UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Penetapan Justice Collaborator dalam Rangka Menekan Tingkat Korupsi
GALUH PUSPITASARI, Prof. Dr. Eddy O.S. Hiariej
Universitas Gadjah Mada, 2017 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul H.B, Teguh Prasetyo, 2005, *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi (cetakan II)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Adang, Yesmil Anwar, 2011, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia)*, Widya Padjajaran, Bandung.

Alatas, 1987, *Korupsi Sifat, Sebab dan Fungsi,* LP3ES, Jakarta.

Ali, Achmad, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta.

Arief, Barda Nawawi, Muladi, 1984, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Arief, Barda Nawawi, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

_____, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

_____, 2000, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

_____, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan,* Citra Aditya Bakti, Bandung.

_____, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana,* Citra Aditya Bakti, Bandung.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Penetapan Justice Collaborator dalam Rangka Menekan Tingkat Korupsi
GALUH PUSPITASARI, Prof. Dr. Eddy O.S. Hiariej
Universitas Gadjah Mada, 2017 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

_____, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana,* Citra Aditya Bakti, Bandung.

_____, 2005, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Cetakan Ketiga Edisi Revisi),* PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

_____, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru (cetakan ke-5)*, Kencana, Jakarta.

_____, 2010, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Atmasasmita, Romli, 1996, *Sistem Peradilan Pidana (Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme)*, Binacipta, Bandung.

_____, 2004, *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Mandar Maju, Bandung.

Bakhri, Syaiful, 2010, *Kebijakan Kriminal Perspektif Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Total Media, Jakarta.

Black, Herry Campbell, 1968, *Black's Law Dictionary*, West Publishing Co, St. Paul.

_____, 1983, *Black's Law Dictionary with Pronounciations*, West Publishing, St. Paul.

Chazawi, Adam, 2005, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi Indonesia*, Banyumedia, Jawa Timur.

Cheruddin, *et all*, 2009, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi,* Refika Aditama, Bandung.

Danil, Elwi, 2011, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, Rajawali Pers, Jakarta.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Penetapan Justice Collaborator dalam Rangka Menekan Tingkat Korupsi
GALUH PUSPITASARI, Prof. Dr. Eddy O.S. Hiariej
Universitas Gadjah Mada, 2017 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Djaja, Ermasnyah, 2009, *Memberantas Korupsi Bersama KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi,* Sinar Grafika, Jakarta.

Djaman Andhi Nirwanto, Djoko Prakoso 1984, *Euthanasia Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur.

Elin Waring, David Weisburd, 2001, *White-Collar Crime and Criminal Careers*, Cambridge University Press, Australia.

Fachmi, 2011, *Kepastian Hukum Mengenai Putusan Batal Demi Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia,* Ghalia Indonesia Publishing, Jakarta.

Friedman, Lawrence M., 1984, *American Law: An Introduction,* W.W. Norton and Co., New York.

G. Widiartana, Al. Wisnubroto, 2005, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana,* PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Hadjon, Philipus M., *et all*, 2012, *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi,* Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Hamzah, Andi, 1984, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya,* PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Harahap, M. Yahya, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta.

_____, 2003, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989)*, Sinar Grafika, Jakarta.

Hartanti, Evi, 2006, *Tindak Pidana* Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Penetapan Justice Collaborator dalam Rangka Menekan Tingkat Korupsi
GALUH PUSPITASARI, Prof. Dr. Eddy O.S. Hiariej
Universitas Gadjah Mada, 2017 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Herman, G. Nicholas, 2010, *Plea Bargaining (second edition),* Juris Publishing, New York.

Information, Europol Public, 2013, *Threat Assessment Italian Organised Crime,* The Hague.

Kaligis, OC, 2011, *Kejahatan Jabatan dalam Sistem Peradilan Terpadu,* Alumni, Bandung.

Kelsen, Hans, 2010, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media, Bandung.

Koeswadji, Harmien Hadiati, 1995, *Perkembangan Macam-Macam Pidana dan Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Lamintang, P.A.F, 1990, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (cetaka 2)*, Sinar Baru, Bandung.

Lamintang, P.A.F & Theo Lamintang, 1991, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabatan dan Kejahatan Jabatan Tertentu sebagai Tindak Pidana Korupsi,* PIonir Jaya, Bandung.

Marzuki, Peter Mahmud, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Marzuki, Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Yogyakarta.

MD, Moh. Mahfud, 2001, *Politik Hukum di Indonesia (cetakan kedua),* PT. Pustaka LP3ES, Jakarta.

Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Montanino, Fred, 1987, "Unintended Victims of Organized Crime Witness Protection"*, Criminal Justice Policy Review,* Vol. 2, No. 4.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Penetapan Justice Collaborator dalam Rangka Menekan Tingkat Korupsi
GALUH PUSPITASARI, Prof. Dr. Eddy O.S. Hiariej
Universitas Gadjah Mada, 2017 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Mubyarto, 1980, *Ilmu Ekonomi, Ilmu Sosial dan Keadilan*, Yayasan Agro Ekonomi, Jakarta.

Muhadar, *et all*, *Perlindungan Saksi & Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*, CV. Putra Media Nusantara, Surabaya .

Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana,* Badan Penerbit UNDIP, Semarang.

_____, 1995, *Hal-Hal yang Harus Dipertimbangkan Hakim dalam Penjatuhkan Pidana dalam Rangka Mencari Keadilan dalam Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana,* Badan Penerbit UNDIP, Semarang.

Mulyadi, Lilik, 2010, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

_____, 2010, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

_____, 2015, *Perlindungan Hukum Whistleblower &Justice Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*, Alumni, Bandung.

Nurdjana, IGM, 2010, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi "Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum",* Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Permana, IS Heru, 2007, *Politik Kriminal,* Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

Poernomo, Bambang, 1984, *Potensi Kejahatan Korupsi di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Penetapan Justice Collaborator dalam Rangka Menekan Tingkat Korupsi
GALUH PUSPITASARI, Prof. Dr. Eddy O.S. Hiariej
Universitas Gadjah Mada, 2017 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Pohan, Agustinus, *et all*, 2012, *Hukum Pidana dalam Perspektif,* Pustaka Larasan, Bali.

Prasetyo, Teguh, 2010, *Hukum Pidana (edisi revisi)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Prints, Darwan, 2002, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Priyatno, Dwidja, 2004, *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia,* CV Utomo, Bandung.

Prodjohamidjojo, Martiman, 2001, *Penerapan PembuktianTerbalik dalam Delik Korupsi,* Mandar Maju, Bandung.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta.

Rahardjo, Satjipto, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Ranuhandoko, I. P. M, 2003, *Terminologi Hukum Inggris Indonesia (cetakan III)*, Sinar Grafika, Jakarta.

Reksodiputro, Mardjono, 1994, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi)*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta.

Remmelink, Jan, 2003, *Hukum Pidana Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Penetapan Justice Collaborator dalam Rangka Menekan Tingkat Korupsi
GALUH PUSPITASARI, Prof. Dr. Eddy O.S. Hiariej
Universitas Gadjah Mada, 2017 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Rukmini, Mien, 2009, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*, Alumni, Bandung.

Rush, George E., 2003, *The Dictionary of Criminal Justice (sixt edition)*, Hill Companies, United State of America.

Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.

_____, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

_____, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, Sri Mamuji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif "Suatu Tinjauan Singkat"*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Subekti, R, 1983, *Hukum Perjanjian,* Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sudarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana,* Alumni, Bandung.

_____, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Sumardjono, Maria SW., 2014, Metodologi Penelitian Ilmu Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Suyatno, 2005, *Korupsi, Kolusi, Nepotisme,* Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Syamsudin, Aziz, 2011, *Tindak Pidana Khusus (Cet.II)*, Sinar Grafika, Jakarta.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Penetapan Justice Collaborator dalam Rangka Menekan Tingkat Korupsi
GALUH PUSPITASARI, Prof. Dr. Eddy O.S. Hiariej
Universitas Gadjah Mada, 2017 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Wisnubroto, Al, 1999, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalagunaan Komuputer,* Penerbit Universitas Atmajaya, Yogyakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)

Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 2012

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PIdana Korupsi disertai Penjelasannyya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disertai Penjelasannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Penetapan Justice Collaborator dalam Rangka Menekan Tingkat Korupsi
GALUH PUSPITASARI, Prof. Dr. Eddy O.S. Hiariej
Universitas Gadjah Mada, 2017 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4250)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4401)

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indnesia Nomor 5076)

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana *(WhistleBlower)* dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama *(Justice Collaborators)* di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 124/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 151/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 32/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PST

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 14/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PST

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 59/PID.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst

Putusan MK No 65/PUU-VIII/2010

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Penetapan Justice Collaborator dalam Rangka Menekan Tingkat Korupsi
GALUH PUSPITASARI, Prof. Dr. Eddy O.S. Hiariej
Universitas Gadjah Mada, 2017 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

United Nation Convention Against Corruption

Netherland Code of Criminal Procedure (Wetboek van Strafvordering)

Netherland Penal Code (Wetboek van Strafrecht)

Protected Disclosure Act Nomor 26 tahun 2000

C. Makalah

Artantojati, Sigit, 2012, *Perlindungan terhadap Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborators)* oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Tesis, Jakarta.

Bahan Focus Group Discussion Divisi Kajian Riset dan Satuan Tuas Pemberantasan (Satgas) Mafia Hukum Unit Kegiatan Presiden RI, Pokok-Pokok Pikiran Perubahan UU 12/2006 dalam Rangka Perlindungan Whistleblower.

Barkatullah, Abdul Halim, "Budaya Hukum Masyarakat dalam Perspektif Sistem Hukum", *Naskah Publikasi*, Banjarmasin.

Budivaja, Yulianus Bandrio, "Eksistensi Pidana Denda di dalam Penerapannya", *Jurnal Hukum*, Vol. XIX, No.19, Oktober 2010.

Crijns, J.H., "Witness Agreement in Dutch Criminal Law", International Seminar and Focus Group Discussion on The Protection of Whistleblower as Justice Collaborators, Jakarta, 19-20 Juli 2011.

Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch, 2005, *Mengenal Perlindungan Saksi di Jerman*.

Kansil, Fernando I,, "Sanksi Pidana dalam Sistem Pemidanaan Menurut KUHP dan di Luar KUHP", *Lex Crimen,* Vol. III, No.3, Mei-Juli 2014.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Penetapan Justice Collaborator dalam Rangka Menekan Tingkat Korupsi
GALUH PUSPITASARI, Prof. Dr. Eddy O.S. Hiariej
Universitas Gadjah Mada, 2017 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Lilik Mulyadi, Menggagas Konsep dan Model Ideal Perlindungan Hukum terhadap *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* dalam Upaya Penanggulangan *Organized Crime* di Indoesia Masa Mendatang, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 3, Nomor 2, Juli 2014.

Coby Elisabeth Mamahit, Kajian Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Saksi Pelaku Tindak Pidana yang Bekerjasama *(Justice Collaborator)*", *Lex Crimen,* Vol. V, No. 6, Agustus 2016.

Sameko, Adji, "Menggugat Relasi Filsafat Positivisme dengan Ajaran Hukum Doktrinal", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12 No. 1, Januari 2012.

Tanzi, Vito, 1998, "Corruption Around the World: Cause, Consequences, Scope, and Cures", *International Monetary Fund Working Paper*, WP/98/63, May 1998.

Nixon, 2013, *Pelindungan Hukum terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Tesis, Sumatera Utara.

Wisnu Mulyadi, Adhitya, 2015, *Perlindungan Hukum terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Korupsi*, Tesis, Denpasar Bali.

Asy, "Laporan dari Den Haag, Belajar tentang Justice Collaborator dari Belanda", *http://news.detik.com/berita/2190269/belajar-tentang-justice-collaborator-dari-belanda,* diakses 24 Oktober 2016.

BBC Indonesia, "Akil Mochtar Divonis Hukuman Seumur Hidup", *http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/06/140630_vonis_akil_muchtar*, diakses 19 Januari 2017.

Berita Satu, *"Empat Syarat Justice Collaborator"*, *http://m.beritasatu.com/hukum/48586-empat-syarat-justice-collaborator.html*, diakses 8 februari 2017.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Penetapan Justice Collaborator dalam Rangka Menekan Tingkat Korupsi
GALUH PUSPITASARI, Prof. Dr. Eddy O.S. Hiariej
Universitas Gadjah Mada, 2017 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Fachrudin, Fachri, "ICJR Sebut Kejaksaan Paling "Obral" Status "Justice Collaborator"", *http://nasional.kompas.com/read/2016/08/19/23101911/icjr.sebut.kejaksaan.paling.obral.status.justice.collaborator.*, diakses 18 Oktober 2016.

Firmanto, Danang, "Pengacara Damayanti Sebut Vonis Hakim Sesuai Prediksi", *http://m.tempo.co/read/news/2016/09/26/0663807407/pengacara-damayanti-sebut-vonis-hakim-sesuai-prediksi*, diakses 18 Oktober 2016.

Gabrillin, Abba, "ICW sebut Semester Awal 2016, 755 Kasus Korupsi Mangkrak di Lembaga Penegak Hukum", *http://nasional.kompas.com/read/2016/08/28/15430021/icw.sebut.semester.awal.2016.755.kasus.korupsi.mangkrak.di.lembaga.penegak.hukum*, diakses 18 oktober 2016.

Hein, Matthias von, "Whistleblowers in Germany: Loved, hated, poorly protected", *http://www.dw.com/en/whistleblowers-in-germany-loved-hated-poorly-protected/a-19228525*, diakses 2 November 2016.

Ichsan, "Hakim Setyabudi Divonis 12 Tahun Penjara", *http://www.tribunnews.com/regional/2013/12/17/hakim-setyabudi-divonis-12-tahun-penjara*, diakses 19 Januari 2017.

Kemkominfo, PPID, "Kesehatan Spiritual Pejabat Publik", *https://ppid.kominfo.go.id/2013/10/31/pejabat-publik/*, diakses 2 Januari 2017.

Kompasiana, "Fondasi Kuat Lawan Korupsi di Negeri Kincir Angin", *http://www.kompasiana.com/betrikaoktaresa/fondasi-kuat-lawan-korupsi-di-negeri-kincir-angin_56a1ad794f7a61a905d0b3da*, diakses 13 Februari 2017.

Lembaga Pencegah Korupsi (LPK), "Konsep Pencegahan Korupsi Pada Lembaga-Lembaga Negara", *http://lpk.wiramandiri.com/artikel/lpk2.pdf*, diakses 22 Oktober 2016.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Penetapan Justice Collaborator dalam Rangka Menekan Tingkat Korupsi
GALUH PUSPITASARI, Prof. Dr. Eddy O.S. Hiariej
Universitas Gadjah Mada, 2017 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Mulyadi, Lilik, "Menggagas Konsep dan Model Ideal Perlindungan Hukum terhadap *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* dalam Upaya Penanggulangan *Organized Crime* di Indonesia Masa Mendatang", *http://www.jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/view/86,* diakses 16 Maret 2017.

OXFORD University Press, "Oxford Reference", *http://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780195369380.001.0001/acref-9780195369380-e-2036,* diakses 17 Januari 2017.

Purwaningsih, Ayu, "Negara-negara Paling Bersih Korupsi 2015", *http://m.dw.com/id/negara-negara-paling-bersih-korupsi-2015/g-19006940*, diakses 9 Februari 2017.

Pustaka, Warta, "10 Negara dengan Peringkat Korupsi Terendah di Dunia", *http://www.google.com/amp/s/wartapustaka.wordpress.com/2014/07/01/10-negara-dengan-peringkat-korupsi-terendah-di-dunia/amp/*, diakses 16 Maret 2017.

Rahmi, Novrieza, "Pro Kontra Pakar Soal Penghapusan Syarat Justice Collaborator di PP 99/2012", *http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57adde429fcb5/pro-kontra-pakar-soal-penghapusan-syarat-ijustice-collaborator-i-di-pp-99-2012,* diakses 2 November 2016.

RFQ, "Ini Dampak Perbedaan Pandangan Penetapan Justice Collaborator di Pengadilan", *http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt575a7ceb3bbe8/ini-dampak-perbedaan-pandangan-penetapan-justice-collaborator-di-pengadilan,* diakses 2 November 2016.

RMOL, *"KPK Menyetujui Damayanti Menjadi Justice Collaborator"*, *http://hukum.rmol.co/read/2016/08/30/258802/KPK-Menyetujui-Damayanti-Menjadi-Justice-Collaborator-*, diakses 7 Februari 2017.

Sahbani, Agus, "Begini Alasan MK Ubah Delik Tipikor", *http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5888f5b5bb039/begini-alasan-mk-ubah-delik-tipikor*, diakses 7 Februari 2017.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Penetapan Justice Collaborator dalam Rangka Menekan Tingkat Korupsi
GALUH PUSPITASARI, Prof. Dr. Eddy O.S. Hiariej
Universitas Gadjah Mada, 2017 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Sari Pratiwi, Priska, "Pandangan Penegak Hukum pada Justice Collaborator Tak Sama", *http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160630083253-12-141983/pandangan-penegak-hukum-pada-justice-collabolator-tak-sama/,* diakses 2 November 2016.

Strack, Guido, "Whistleblowing in Germany: Whistleblowers and Employers' Interest", *http://www.whistleblower-net.de/pdf/WB_in_Germany.pdf*, hlm.4-5, diakses 12 November 2016.